

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, di mana presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, terdapat pemisahan kekuasaan yang dikenal sebagai prinsip Trias Politica, yang mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk mengisi posisi dalam kekuasaan ini, terutama di bidang eksekutif dan legislatif, diperlukan proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat (Salfa, 2023).

Dalam praktik politik di Indonesia, dominasi laki-laki masih sangat kuat, baik secara historis maupun saat ini. Kekuasaan dalam Trias Politica sebagian besar dikendalikan oleh pria, pola yang telah terjadi sejak masa pemerintahan presiden pertama hingga sekarang. Faktanya, pada era kerajaan, sebagian besar pemimpin adalah laki-laki. Dominasi ini sering dikaitkan dengan budaya patriarki, yang telah tertanam dalam pola pikir masyarakat Indonesia, termasuk dalam ranah politik. Perempuan sering dianggap kurang kompeten dan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga mereka menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh hak politik yang setara (Najah, 2024).

Kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik telah mendorong penerapan kebijakan afirmatif. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan hak representasi perempuan dalam pengelolaan partai politik, peningkatan representasi perempuan di parlemen, mendorong partisipasi politik perempuan, dan memperkuat peran perempuan dalam kepemimpinan dan pembuatan kebijakan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk membuka lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif, menyuarakan aspirasi mereka, dan membawa perubahan positif baik di parlemen maupun di negara secara keseluruhan (Nastiti, 2019).

Pendekatan analisis gender diperlukan untuk memahami bagaimana pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dipertimbangkan dalam proses politik. Dengan menggunakan perspektif gender, dapat dilihat sejauh mana sistem politik dan kebijakan mendukung partisipasi perempuan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas representasi. Oleh karena itu, penelitian tentang dinamika representasi perempuan dalam pemilihan legislatif, dilihat dari perspektif gender,

menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan solusi dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan secara berkelanjutan (Salfa, 2023).

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik disebabkan oleh berbagai hambatan, termasuk hambatan budaya dan struktural, serta bias gender yang sangat kuat. Bias ini tidak hanya ditemukan di masyarakat umum tetapi juga di lingkungan politik dan pemerintahan itu sendiri. Perempuan menghadapi kesulitan untuk masuk ke dalam sistem pemilu di Indonesia, meskipun ada tekanan internasional untuk mendorong pemilu yang inklusif (yunita Nur Fadilla, 2017).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,447, penurunan sebesar 0,012 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini adalah indikator positif bahwa Indonesia secara perlahan telah berhasil meningkatkan kesetaraan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan representasi di bidang politik (komisi pemilihan Umum, 2025).

Peningkatan skor Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan bahwa telah ada upaya signifikan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dalam memperkuat peran perempuan di berbagai bidang. Namun, meskipun ada kemajuan, angka ini juga menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih merupakan tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Kesetaraan gender memerlukan dukungan yang lebih kuat, baik melalui kebijakan afirmatif, peningkatan akses pendidikan dan pekerjaan, serta perubahan budaya yang lebih mendukung peran perempuan. Oleh karena itu, penurunan IKG ini seharusnya menjadi motivasi untuk melanjutkan berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua (komisi pemilihan Umum, 2025).

Perwakilan perempuan dalam politik di Indonesia masih relatif rendah, meskipun jumlah pemilih perempuan hampir setara dengan jumlah pemilih laki-laki. Ini menunjukkan adanya tantangan struktural, kultural, dan sosial yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dan setara dalam politik. Salah satu tantangan utama adalah dominasi laki-laki dalam organisasi dan institusi publik, di mana peran kepemimpinan sering kali didominasi oleh laki-laki, sehingga menyulitkan perempuan untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang setara. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan budaya yang masih kuat di Indonesia, termasuk nilai-nilai patriarki, semakin memperkuat stereotip gender yang menganggap perempuan kurang kompeten atau tidak layak untuk memimpin (Najah, 2024).

Di wilayah Jawa Timur, terdapat sejumlah anggota perempuan yang berperan aktif dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai kabupaten. Di Jember, terdapat 11 orang anggota perempuan, sementara di Bondowoso, jumlahnya mencapai 8 orang. Jumlah anggota DPRD perempuan di Kabupaten Probolinggo adalah 11 orang, sedangkan di Kabupaten Pasuruan terdapat 9 orang anggota DPRD perempuan. Situbondo memiliki 9 orang anggota perempuan, sedangkan Banyuwangi mencatatkan jumlah tertinggi dengan 16 orang. Terakhir, di Lumajang, terdapat 14 orang anggota Perempuan (Banyuwangi, 2024).

Banyak daerah di Indonesia yang hingga saat ini masih menghadapi permasalahan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kesenjangan gender dalam ranah politik, yang berdampak pada kurangnya representasi suara dan kepentingan perempuan dalam pengambilan keputusan publik (Idezia, 2024).

Kabupaten Lumajang, dengan capaian keterwakilan perempuan di DPRD yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain di Jawa Timur, menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Tingginya jumlah anggota DPRD perempuan di Lumajang membuka peluang untuk dianalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, apakah hal tersebut didorong oleh dinamika politik lokal, budaya masyarakat yang mendukung partisipasi perempuan, atau faktor sosial lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai partisipasi politik perempuan di tingkat lokal serta implikasinya terhadap proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah (Bondowoso, 2024).

Keberadaan anggota perempuan ini sangat penting dalam mewakili suara dan aspirasi masyarakat, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Sistem budaya politik dan mekanisme rekrutmen partai politik juga merupakan hambatan besar. Proses seleksi untuk calon legislatif seringkali tidak menunjukkan bias terhadap perempuan, bahkan ketika ada kebijakan afirmatif seperti kuota 30%. Partai politik cenderung memprioritaskan kandidat dengan dukungan keuangan yang kuat, jaringan luas, dan pengaruh politik, yang lebih umum ditemukan di kalangan pria. Bagi perempuan, kurangnya akses terhadap sumber daya keuangan dan dukungan minimal dari pemimpin laki-laki di partai semakin mempersempit peluang mereka untuk terpilih (Aulia Ramadhanty, 2024).

Semua tantangan ini menciptakan siklus yang sulit untuk diputus, di mana perempuan tidak hanya menghadapi hambatan untuk masuk ke dunia politik, tetapi juga berjuang untuk tetap bertahan dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk mengubah sistem politik, memperkuat dukungan untuk kandidat perempuan, dan membangun budaya politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kesetaraan gender (Anis Farida et al., 2021).

Dalam pemilu 2024, perempuan dan anak-anak, terutama sebagai pemilih pemula, memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Berdasarkan data, dari total 203 juta pemilih terdaftar, sekitar 101 juta atau hampir setengahnya adalah pemilih perempuan. Angka ini menempatkan perempuan sebagai kelompok signifikan dalam membentuk hasil pemilihan. Selain itu, kaum muda, termasuk perempuan, yang menggunakan hak suara mereka untuk pertama kalinya juga merupakan kekuatan potensial yang dapat berpengaruh besar terhadap hasil pemilu (Warsyena, 2021).

Partisipasi perempuan dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin, tidak hanya berdampak pada peningkatan kesetaraan gender tetapi juga memastikan bahwa isu-isu yang relevan dengan perempuan dan anak-anak mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan publik. Sebagai pemilih, perempuan memiliki peran penting dalam menyuarakan kebutuhan mereka, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Sementara itu, keterlibatan perempuan sebagai kandidat dalam pemilu juga merupakan kesempatan untuk menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dan representatif dalam pengambilan keputusan politik (Warsyena, 2021).

Namun, untuk memaksimalkan peran perempuan dan anak-anak sebagai pemilih pemula, upaya serius diperlukan untuk memberikan pendidikan politik yang memadai. Pemahaman tentang pentingnya menggunakan hak suara dengan bijak harus ditanamkan sejak dini, agar mereka dapat memilih berdasarkan penilaian rasional. Bukan karena pengaruh emosional atau tekanan sosial. Dengan mengoptimalkan peran kelompok ini, Pemilu 2024 dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dan anak-anak dalam politik, sekaligus mendorong terciptanya demokrasi yang lebih inklusif dan adil (Warsyena, 2021).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meskipun representasi perempuan di parlemen telah menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan yang ideal. Data pemilu 2019 mencatat bahwa perempuan hanya mengisi 20,5% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun angka ini kemudian

meningkat menjadi 21,39% pada tahun 2021 akibat proses pergantian antar waktu (PAW). Angka ini menunjukkan kemajuan, tetapi masih jauh dari target 30% representasi perempuan yang diamanatkan dalam kebijakan afirmatif (HUMAS, 2024).

Sementara itu, representasi perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) relatif lebih baik, bahkan melebihi target afirmatif dengan mencapai 30,4%. Namun, pencapaian ini tidak merata, terutama di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di mana representasi perempuan masih berada di angka 30%. Angka yang rendah ini mencerminkan tantangan yang lebih besar di tingkat regional, termasuk dominasi budaya patriarki, akses terbatas perempuan terhadap sumber daya politik, dan kurangnya dukungan partai dalam mempromosikan kandidat perempuan (HUMAS, 2024).

Meningkatkan representasi perempuan di parlemen tidak hanya penting untuk kesetaraan gender, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada langkah strategis yang lebih kuat, seperti memperkuat pelaksanaan kebijakan afirmatif yang menyediakan pelatihan kepemimpinan politik bagi perempuan, dan mengubah budaya politik agar lebih inklusif, sehingga perempuan dapat berkontribusi lebih optimal di semua tingkat pemerintahan (HUMAS, 2024).

Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Lumajang tercatat sebesar 0,322, menunjukkan penurunan signifikan sebesar 0,15 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,472. Penurunan ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam meningkatkan kesetaraan gender di daerah tersebut, mengingat penurunan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan IKG pada tahun 2022 yang hanya sebesar 0,01 poin. Tren positif ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak lainnya telah menghasilkan hasil konkret dalam mengurangi kesenjangan gender (K. P. Umum, 2024).

Perbaikan ini juga merupakan kelanjutan dari tren positif yang telah terlihat sejak 2021, di mana Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lumajang secara konsisten menurun. Selama dua tahun terakhir, langkah-langkah strategis dalam mendukung kesetaraan gender, seperti meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan politik, telah menunjukkan hasil yang nyata. Secara keseluruhan, sejak tahun 2018, Kabupaten Lumajang telah berhasil mengurangi IKG sebesar total 0,22 poin dalam periode lima tahun. Prestasi ini mencerminkan komitmen yang berkelanjutan untuk meningkatkan

posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di tingkat lokal (K. P. Umum, 2024).

Namun, perjalanan menuju kesetaraan gender yang ideal masih memerlukan kerja keras. Angka IKG sebesar 0,322 menunjukkan bahwa masih ada disparitas gender yang perlu ditangani, terutama di sektor-sektor tertentu yang mungkin memerlukan perhatian lebih. Penurunan signifikan pada tahun 2023 seharusnya menjadi motivasi untuk melanjutkan upaya yang ada dan bahkan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender. Dengan konsistensi dan kerjasama dari berbagai pihak, Kabupaten Lumajang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat pencapaian kesetaraan gender yang lebih luas dan berkelanjutan (Satriawan, 2019).

Persentase perempuan yang rendah di legislatif di Lumajang juga dapat berdampak pada kebijakan publik yang kurang sensitif terhadap isu-isu yang lebih berdampak pada perempuan, seperti perlindungan perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Partisipasi perempuan yang minim di legislatif menunjukkan tantangan dalam mencapai representasi yang lebih seimbang dan inklusif dalam politik. Dari data BPS Lumajang 2023, kondisi ini juga menekankan pentingnya langkah-langkah afirmatif yang dapat membuka akses lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti kuota gender dalam nominasi legislatif atau pelatihan kepemimpinan bagi calon legislatif (Satriawan, 2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang telah mengadakan rapat pleno untuk menentukan perolehan kursi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan DPRD Kabupaten Lumajang untuk Pemilu 2024. Penetapan ini dinyatakan dalam Keputusan KPU Lumajang nomor 897 tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Komisioner KPU Lumajang, Yuyun Baharita, pada 2 Mei 2024. Dari total 50 kursi di DPRD Lumajang, partai Gerindra berhasil memenangkan kursi terbanyak, yaitu 11 kursi. Berikut adalah rincian perolehan kursi DPRD Lumajang untuk periode 2024-2029: Gerindra 11 kursi, PKB 10 kursi, PDI Perjuangan 9 kursi, PPP 7 kursi, Golkar 4 kursi, Demokrat 4 kursi, NasDem 3 kursi, dan PKS 2 kursi. Dari hasil Pemilu 2019-2024, ada partai politik yang kehilangan kursi di DPRD Lumajang, yaitu partai Hanura yang kehilangan 2 kursi dan partai PAN yang kehilangan 1 kursi (Lumajangsatu.com, 2024).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan berikut: *Faktor-faktor apakah yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam pileg tahun 2024 di DPRD Kabupaten Lumajang?*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lumajang dalam mengatasi rendahnya keterwakilan perempuan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.5 Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani rendahnya keterwakilan perempuan dalam pileg 2024.

#### **1.6 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam ilmu sosial, terutama dalam kajian keterwakilan perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai struktur ketidakadilan yang ada, serta memberikan dasar bagi terciptanya perubahan sosial yang adil dan setara di Kabupaten Lumajang.

#### **1. Secara Akademis**

Penelitian menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember.

#### **2. Pemerintah**

Penelitian ini memberikan panduan komprehensif bagi pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan gender secara efektif, yang akan membantu membangun masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan.